

BAB IV

ANALISIS DAN TEMUAN

Pada bab ini, untuk mengetahui analisis perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan No.14 Tahun 2017 di perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Penulis telah mendapatkan data dari perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (*in depth-interview*) yaitu menggunakan pedoman wawancara dimana pertanyaan yang diajukan secara bebas kepada informan tetapi tidak keluar dari bahasan yang terdapat didalam Standar Nasional Perpustakaan Khusus No.14 Tahun 2017. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala Perpustakaan Badan Pusat Statistik dan Staf bagian layanan, sementara itu untuk teknik observasi menggunakan teknik checklist dengan menggunakan pedoman Standar Nasional Perpustakaan dan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

A. Kondisi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan wawancara

1. Koleksi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Koleksi adalah salah satu komponen dalam perpustakaan, tanpa adanya koleksi yang baik maka perpustakaan tidak akan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pemustakanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan koleksi perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disebarluaskan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan

informasi mereka.⁵² Adapun tujuan penyediaan koleksi perpustakaan khusus adalah untuk menunjang pelaksanaan program lembaga induknya.

a. Jenis Koleksi Di Perpustakaan Badan Pusat Statistik

Perpustakaan Badan Pusat Statistik merupakan jenis perpustakaan khusus yang mana berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan khusus No 14 tahun 2017 tentang standar koleksi perpustakaan bahwa jenis koleksi yang ada diperpustakaan khusus yaitu meliputi:⁵³

1. Karya cetak, terdiri dari buku, terbitan berkala

Karya cetak adalah hasil dari pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak, seperti berikut:⁵⁴

- a) Buku dikenal juga dengan istilah monograf adalah bahan pustaka yang merupakan satu kesatuan yang utuh tidak berseri.
- b) Terbitan berkala atau terbitan berseri adalah bahan pustaka yang direncanakan untuk diterbitkan terus-menerus dengan jangka waktu tertentu dan yang termasuk jenis ini adalah harian (surat kabar), majalah(mingguan, bulanan, dan lainnya), buletin, jurnal, warta atau newsletter, laporan yang terbit dengan jangka waktu tertentu, seperti laporan tahunan triwulan.

⁵²Yulia, Y. & Sujana, J. G., *Pengembangan koleksi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009) hal 1.5 diakses tgl 09-10-2019

⁵³Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”, 2017, hal 6 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -07-2019

⁵⁴Yulia, Y. & Sujana, J. G., *Pengembangan koleksi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009) hal 1.23 diakses tgl 09-10-2019

2. Karya rekam, terdiri dari rekaman suara, audiovisual yaitu:⁵⁵
 - a) Jenis rekaman suara adalah piringan hitam, kaset, cakram (*disk*) dan jika dilihat dari segi isi diantaranya yaitu rekaman musik, sandiwara, pembacaan puisi, wawancara, seminar, ceramah, pelajaran bahasa dan sebagainya.
 - b) Audiovisual adalah film (gambar hidup) dan rekaman video. Film dapat diartikan sebagai gambar hidup yang merupakan perkembangan dari gambar biasa, ada dua jenis gambar hidup yaitu film bersuara dan film bisu.
3. Karya dalam bentuk elektronik yaitu CD-ROM (*Compact Disc Read Only Memori*), disket, bahan pustaka yang dilayankan secara online seperti jurnal online.⁵⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bagian staf layanan perpustakaan Badan Pusat Statistik jenis koleksi perpustakaan dibawah ini yaitu:⁵⁷

“Diperpustakaan kita memiliki jenis koleksi karya cetak berupa buku terbitan dari kantor pusat di jakarta tentang bidang produksi, bidang sosial, bidang distribusi, bidang neraca dan kantor di sumsel tentang bidang sosial, bidang distribusi, bidang produksi, bidang neraca, data penduduk yaitu berdasarkan kota, kabupaten, kecamatan dan desa seperti sumsel dalam angka, Palembang dalam angka sedangkan karya dalam bentuk rekaman suara itu pernah ada tetapi bukan perpustakaan yang menyimpannya tepatnya bagian urdal (tempat untuk surat masuk-surat keluar, tempat menyalurkan surat, tempat menerima dokumen dari luar dan mengelompokkan dokumen tersebut) yang menyimpannya dan

⁵⁵Yulia, Y. & Sujana, J. G., *Pengembangan koleksi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009) hal 1.24 diakses tgl 09-10-2019

⁵⁶Yulia, Y. & Sujana, J. G., *Pengembangan koleksi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009) hal 1.25 diakses tgl 09-10-2019

⁵⁷Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

koleksi dalam bentuk elektronik yang berupa data daerah dalam angka yang dipublikasikan melalui website BPS dengan link yaitu www.bps.co.id”

4. Perpustakaan menyediakan koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal (*repository*).

Koleksi muatan lokal, meliputi koleksi lokal (*local collection*) dan literatur kelabu (*grey literature*), koleksi lokal meliputi bahan pustaka tentang suatu topik yang sifatnya lokal. Sedangkan literatur kelabu meliputi semua karya ilmiah dan non-ilmiah yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi atau lembaga induk lainnya dari perpustakaan yang bersangkutan.⁵⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staf layanan yaitu:⁵⁹

“kalau terbitan lokal di perpustakaan Badan Pusat Statistik itu buku tentang bidang sosial, bidang distribusi, bidang produksi, bidang neraca dan data penduduk seperti daerah dalam angka, sumsel dalam angka, Palembang dalam angka dan lain-lainnya, untuk laporan penelitian ada tetapi hanya satu yaitu penelitian yang didapat peneliti dari kepala BPS Ogan Ilir dan jurnal-jurnal yang dibuat oleh anak magang di kantor BPS”

5. Ruang lingkup koleksi perpustakaan terdiri dari bacaan umum, berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan lembaga induk dan masyarakat di lingkungan lembaga induk dan masyarakat disekitarnya, koleksi referensi, laporan penelitian, jurnal sesuai dengan organisasi induknya dan literatur kelabu.

⁵⁸Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

⁵⁹Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staf layanan yaitu:⁶⁰

“ruang lingkup koleksi perpustakaan yaitu seluruh terbitan yang diterbitkan oleh BPS yaitu bidang sosial, bidang distribusi, bidang produksi, bidang neraca dan data penduduk berupa kecamatan dalam angka, kabupaten dalam angka, laporan penelitian ada dari kepala BPS Ogan Ilir, jurnal yang dihasilkan oleh anak magang yang berkaitan dengan lembaga induk”

6. Koleksi referensi paling sedikit terdiri dari ensiklopedi, kamus, buku pedoman, dan indeks.

Wawancara dengan kepala perpustakaan:⁶¹

“Di perpustakaan tidak ada koleksi seperti ensiklopedi, kamus, buku pedoman dan indeks, karena koleksi yang ada di perpustakaan berasal dari kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan dan Badan pusat statistik pusat di jakarta”

7. Jenis koleksi di perpustakaan harus memenuhi kebutuhan pemustaka

Berdasarkan wawancara menurut staf dibagian layanan yaitu:⁶²

“kebanyakan sih sudah memenuhi kebutuhan pemustaka yang datang karena apa yang dibutuhkan pemustaka yang datang ada di perpustakaan BPS, pemustaka yang datang ke perpustakaan BPS itu berasal dari berbagai daerah dan instansi yang memerlukan data - data tentang kependudukan ataupun data-data lainnya yang berhubungan dengan statistik”

Wawancara kepada pemustaka:⁶³

Menurut saya layanan di perpustakaan BPS cukup memenuhi kepuasan, karena ketika buku saya ingin mencari buku yang saya butuh tidak ada di perpustakaan tetapi staf langsung tanggap memberikan buku yang

⁶⁰Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (Staf Layanan Perpustakaan Bps Sumsel), Palembang Senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

⁶¹Wawancara pribadi kepada bapak Trio Wiradharma (Kepala Perpustakaan BPS Sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

⁶²Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (Staf Layanan Perpustakaan BPS Sumsel), Palembang Senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

⁶³Wawancara langsung kepada Marina (Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan) Palembang 7-10-2019 pukul 09:00 WIB

lainnya yang datanya sama seperti yang saya cari walaupun tidak sama persis dan koleksi disana juga lumayan banyak”

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti diatas dan teori yang tentang jenis koleksi perpustakaan bahwa jenis koleksi perpustakaan Badan Pusat Statistik belum memenuhi standar yang ada pada Standar Nasional Perpustakaan no 14 tahun 2017, karena dapat dilihat bahwa pada poin pertama perpustakaan tidak memiliki koleksi berupa terbitan berseri dan karya rekaman yaitu koleksi jenis audiovisual dan rekaman seperti rekaman seminar dan lain-lain.

Pada poin kedua dari jenis koleksi lokal staf mengatakan bahwa hanya ada satu laporan penelitian yang berasal dari kepala BPS Ogan Ilir, di rak tempat penyimpanan buku peneliti tidak melihat ada laporan penelitian. Pada poin ketiga tidak disebutkan juga ruang lingkup koleksi referensi yaitu berupa kamus, ensiklopedia, buku pedoman dan indeks yang seharusnya ada, tetapi pada jenis-jenis koleksi referensi lainnya bahwa koleksi yang di perpustakaan termasuk dari jenis koleksi referensi berupa almanak yang koleksi tersebut berupa data statistik yang didalam ada data penduduk se- Sumatera Selatan,

pada poin terakhir bahwa staf menyatakan kebutuhan pemustaka yang datang sudah terpenuhi, tetapi menurut peneliti apa yang simpulkan oleh staf tersebut belum tepat karena pemustaka yang datang ke perpustakaan hanyalah pemustaka yang mencari data-data tentang kependudukan atau statistik karena dapat dilihat dari jenis-jenis koleksi

tersebut bahwa koleksi disana tidak mencakup apa yang ada pada Standar Nasional Perpustakaan no 14 tahun 2017 dan selain itu berdasarkan wawancara kepada salah pemustaka menurut dia bahwa sudah cukup memuaskan yang berarti koleksi di perpustakaan itu memang belum memenuhi kebutuhan pemustaka.

b. Jumlah Koleksi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan khusus jumlah koleksi diperpustakaan khusus berjumlah 1000, dan persentase koleksi perpustakaan yang sesuai subjek disiplin ilmu atau kepentingan organisasi induk paling sedikit 60% dari jumlah keseluruhan.⁶⁴

Berdasarkan jumlah data yang didapat peneliti di perpustakaan BPS bahwa jumlah koleksi yang ada di perpustakaan BPS berjumlah 1.942 koleksi, data tersebut didapat peneliti dengan cara menghitung langsung koleksi yang ada di perpustakaan dikarenakan perpustakaan tidak memiliki data-data tentang koleksi yang tersedia di perpustakaan dan jumlah persentase koleksi kepentingan organisasi induk yang didapat melalui wawancara kepada staf pelayan perpustakaan di dapat yaitu:⁶⁵

“koleksi khusus BPS ada satu lemari berjumlah 50% dari keseluruhan lembaga induk”.

⁶⁴Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 6 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁶⁵Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

No	Jenis Koleksi	Jumlah
1	Bidang produksi	432 buku
2	Bidang sosial	508 buku
3	Bidang distribusi	364 buku
4	Bidang neraca	396buku

Koleksi pusat

No	Jenis Koleksi	Jumlah
1	Bidang sosial	168 buku
2	Kabupaten kota oku,oki, muaraenim,pali, lahat.	224 buku
3	Bidang distribusi	216 buku
4	Kabupaten kota musi rawas dan mura tara, musi banyuasin, oku selatan.	144 buku
5	Bidang produksi	212 buku
6	Kabupaten kota oku timur, ogan ilir, empat lawang, palembang	104 buku
7	Bidang neraca	104 buku
8	Kabupaten kota prabumulih, pagaralam, lubuk linggau, sumsel	216 buku

Koleksi kabupaten kota palembang

No	Jenis koleksi	Jumlah koleksi
1.	Koleksi Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (20 Kecamatan)	20 buku
2.	Koleksi Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir (16 Kecamatan)	16 buku
3	Koleksi Kecamatan Kabupaten Empat Lawang (10 Kecamatan)	10 buku
4	Koleksi Kecamatan Kota Palembang (18 Kecamatan)	18 buku
5	Koleksi Kecamatan Kabuapten Oki (18 Kecamatan)	18 buku
6	Koleksi Kecamatan Kota Prabumulih (6 Kecamatan)	6 buku
7	Koleksi Kecamatan Kabupaten Muaraenim (20 Kecamatan)	20 buku
8	Koleksi Kecamatan Kota Pagaralam (5 Kecamatan)	5 buku
9	Koleksi Kecamatan Kota Lubuk Linggau (8 Kecamatan)	8 buku
10	Koleksi Kecamatan Kabupaten Musi Rawas (7 Kecamatan)	7 buku

11	Koleksi Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin (14 kecamatan)	14 buku
12	Koleksi kecamatan kabupaten banyuasin (19 kecamatan)	19 buku
13	Koleksi kecamatan kabupaten pali (5 kecamatan)	5 buku
14	Koleksi kecamatan kabupaten oku selatan (19 kecamatan)	19 buku
15	Koleksi kecamatan di Oku timur (24 kecamatan)	24 buku
16	Koleksi berdasarkan kecamatan di kabupaten Lahat (24 kecamatan)	24 Uku

Koleksi Kecamatan Kabupaten Kota Palembang

Berdasarkan data wawancara dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa jumlah koleksi yang ada di perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan sudah memenuhi standar tetapi untuk koleksi dari

lembaga induknya hanya 50% yang berarti belum memenuhi standar yang seharusnya berjumlah 60%.

c. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus bahwa pengembangan koleksi meliputi:⁶⁶

1. Pengembangan koleksi berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi.
2. Penambahan koleksi paling sedikit 2% dari jumlah judul yang ada pertahun.
3. Kebijakan pengembangan koleksi paling sedikit ditinjau setiap 4 tahun sekali
4. Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi oleh kepala perpustakaan.
5. Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, dan penyiangan bahan perpustakaan.

Berdasarkan wawancara kepada kepala perpustakaan BPS yaitu:⁶⁷

“di perpustakaan BPS untuk pengembangan koleksi berdasarkan kebijakan dari lembaga induk, setiap tahunnya yang rutin ada 28 publikasi yang ditambahkan ke perpustakaan yang harus ada berdasarkan pada arc , selain itu ada droping publikasi dari pusat yang tergantung dari pengiriman yang dilakukan oleh BPS pusat, kalau kebijakan tertulisnya tidak ada karena memang tergantung dari arc tersebut, kebijakan untuk pengembangan hanya pengadaan dari kegiatan arc tersebut kalau kebijakan pengembangan koleksi yang lainnya belum karena anggaran yang didapat untuk pengembangan perpustakaan itu hanya sekitar 15 juta

⁶⁶Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 6-7 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁶⁷Wawancara pribadi kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

dari 50 juta, kalau untuk seleksi dan penyiangan itu belum ada karna memang koleksi yang ada di BPS itu semuanya penting”

Kebijakan pengembangan koleksi yang dilakukan oleh perpustakaan BPS berdasarkan kebijakan dari lembaga induk pada poin pertama standar sudah sesuai dengan standar, pada poin kedua bahwa penambahan koleksi di perpustakaan berdasarkan standar 2%, koleksi yang ada di perpustakaan BPS berjumlah 1.942 dari perhitungan peneliti didapat bahwa 2% dari 1.942 adalah 38.84 koleksi sedangkan penambahan koleksi di perpustakaan berdasarkan wawancara berjumlah 28 publikasi yang berarti belum memenuhi apa yang terdapat pada standar.

Pada poin ketiga kebijakan penambahan koleksi berdasarkan wawancara diatas ditinjau 1 tahun sekali, berarti sesuai dengan standar karena yang terdapat pada standar ditinjau paling sedikit 4 tahun sekali. Pada poin ketiga dari wawancara bahwa perpustakaan tidak memiliki kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis yang seharusnya ada karena kebijakan tersebut adalah pedoman untuk perpustakaan.

d. Cacah Ulang/Stock Opname dan Penyiangan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus:⁶⁸

1. Perpustakaan melakukan cacah ulang dan penyiangan koleksi paling sedikit setiap 3 tahun sekali.

⁶⁸Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 7 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

2. Penyiangan dilakukan dengan mempertimbangkan koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversikan dalam bentuk lain. Di samping itu mempertimbangkan jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan.

Berdasarkan wawancara staf layanan perpustakaan BPS yaitu:⁶⁹

“koleksi yang lama dikeluarkan dari perpustakaan dan di tempat dalam gudang yang keberadaannya jauh dari perpustakaan yaitu di rumah di pakjo dan koleksi yang baru ditempatkan pada rak yang kosong, kegiatan itu kami lakukan terakhir pada tahun 2005, karena perpustakaan direnovasi pada saat itu jadi otomatis buku-buku tersebut dikeluarkan”

Perpustakaan BPS dari wawancara tersebut terlihat jelas bahwa mereka melakukan cacah ulang dan penyiangan yang dilakukan staf atau pegawai yang ada di perpustakaan tetapi kegiatan tersebut dilakukan sekitar tahun 2005 yang menandakan bahwa kegiatan tersebut sudah lama ditinggal sekitar 20 tahun yang lalu, sedangkan seharusnya kegiatan cacah ulang tersebut harus dilakukan 3 tahun sekali berdasarkan apa yang pada Standar Nasional Perpustakaan yang berarti belum memenuhi standar pada poin pertama.

Pada poin pertama perpustakaan terlihat sudah lama meninggalkan kegiatan tersebut otomatis pada poin kedua apa yang ada pada standar bahwa perpustakaan tidak melakukan penyiangan karena pada poin pertama alasan mereka memindahkan koleksi lama karena perpustakaan melakukan

⁶⁹Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan bps sumsel), Palembang Senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

renovasi, berarti jika perpustakaan tidak melakukan renovasi maka perpustakaan tidak akan mengeluarkan koleksi lama tersebut.

e. Pengolahan Bahan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus:⁷⁰

1. Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku terhadap bahan perpustakaan.
2. Bahan perpustakaan yang telah diolah selanjutnya dikirim dan dijajarkan dalam ruangan koleksi paling lama 3 hari dalam proses pengolahan.
3. Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan wawancara staf layanan perpustakaan yaitu:⁷¹

“untuk masalah pengelolaan bahan pustaka pegawai perpustakaan meminta bantuan kepada pegawai bps, buku yang datang dicap, dikasih tanggal penerimaan buku, diberi no klasifikasi, di beri tahukan kepada kepala setelah di acc oleh kepala perpustakaan baru dimasukkan ke dalam lemari, perpustakaan ada aplikasi untuk sistem pencarian buku agar lebih cepat ditemukan”

Pengelolaan bahan pustaka di perpustakaan BPS pada poin pertama pada standar bahwa di perpustakaan menggunakan sistem yang baku dengan sistem pengelolaan koleksi, koleksi yang baru datang di cap lalu di berikan tanggal penerimaan dan diberikan no klasifikasi, karena kekurangan Sumber Daya Manusa maka perpustakaan meminta bantuan kepada pegawai

⁷⁰Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 7 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁷¹Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

BPS lainnya, berarti pada poin pertama perpustakaan sudah memenuhi standar. Pada poin kedua perpustakaan melakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga koleksi belum ditempatkan pada lemari sampai pengelolaan selesai dilakukan dan kepala perpustakaan mengizinkan di letakkan di lemari.

Pada poin ketiga perpustakaan sudah memiliki aplikasi seperti opac untuk mempermudah pencarian koleksi. Berdasarkan data tersebut hanya pada poin kedua pada standar belum sesuai dengan standar, berarti pada pengelolaan bahan pustaka perpustakaan hampir memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

f. Pelestarian Koleksi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Pelestarian koleksi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan pengalih mediaan isi dari suatu format ke format lain.⁷²

Berdasarkan wawancara staf layanan perpustakaan yaitu:⁷³

“kalau ada buku-buku yang rusak terutama yang sering di pakai oleh konsumen data contohnya sumsel dalam angka yang paling sering di pakai oleh konsumen data halaman-halaman banyak yang lepas-lepas, caranya kita ambil ulang halaman yang lepas tersebut lalu kita jilid ulang ke tempat foto copyan dan dibuat dalam bentuk elektronik”

⁷²Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 7 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁷³Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa perpustakaan melakukan pelestarian untuk bahan pustaka di perpustakaan BPS pelestarian tersebut yang dilakukan dengan cara dijilid ulang ke tempat foto copyan dan dialih mediakan yang berarti sudah memenuhi apa yang ada pada standar.

Dari beberapa data yang didapat peneliti dengan cara wawancara tentang koleksi di Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, hanya beberapa poin saja dari standar koleksi yang sudah terpenuhi yaitu poin pelestarian dan pengelolaan yang dilakukakan oleh perpustakaan sedangkan untuk yang lainnya belum memenuhi standar yang ada Pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus no 14 tahun 2017.

2. Sarana dan Prasarana Di Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

a. Gedung Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus:⁷⁴

1. Luas bangunan paling sedikit 200 m².
2. Memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pemustaka.
3. Lantai bangunan yang digunakan untuk menempatkan koleksi harus memenuhi persyaratan konstruksi, paling sedikit 400 kg per m² ekuivalen.

Wawancara dengan kepala perpustakaan:⁷⁵

⁷⁴Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 7 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

“luas gedung perpustakaan BPS 8x20, dari aspek keselamatan perpustakaan tidak berisiko yang jelas untuk keselamatan kejadian kebakaran perpustakaan menyediakan, aspek kesehatan disini kita sediakan tempat bersantai dan wifi agar pengunjung tidak kaku dan larangan merokok didalam perpustakaan dan gedung perpustakaan juga tidak jauh dari pintu luar utama, konstruksi lantai bangunan sekitar 400 kg per m, fasilitas umum di perpustakaan kita mempunyai toilet khusus untuk pemustaka, layanan wifi gratis, konsultasi gratis, layanan pustaka cetak, layanan charger dan loker”



Layanan loker



Layanan charger

⁷⁵Wawancara pribadi kepada bapak Trio wiradharna (kepala perpustakaan BPS Sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa luas perpustakaan BPS 8x20 yaitu 160m², pada standar luas perpustakaan khusus harus 200m² jadi apa yang didapat peneliti dengan apa yang ada di Standar Nasional Perpustakaan itu berbeda yang berarti bahwa luas perpustakaan BPS belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Aspek-aspek yang ada di standar berdasarkan wawancara tersebut menurut peneliti sudah terpenuhi dari aspek kesehatan perpustakaan tidak memperbolehkan pemustaka yang datang untuk merokok diruangan, aspek keselamatan pintu keluar perpustakaan berdekatan dengan pintu utama sehingga jika terjadi kejadian yang tak diinginkan pemustaka bisa langsung keluar dari pintu utama, aspek kenyamanan perpustakaan menyediakan tempat bersantai dan tersedianya juga layanan wifi gratis, aspek keamanan perpustakaan memiliki petugas keamanan seperti satpam yang berada di luar perpustakaan. konstruksi lantai bangunan perpustakaan sudah sesuai dengan standar perpustakaan yaitu 400 kg m². Fasilitas umum perpustakaan yaitu toilet khusus pemustaka, layanan konsultasi , wifi dan tempat charger handpone sudah memenuhi standar.

b. Lokasi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus perpustakaan Terletak dalam satu gedung dengan lembaga induk atau di tempat yang berdekatan dengan gedung lembaga induk.⁷⁶

Wawancara dengan staf layanan perpustakaan:⁷⁷

⁷⁶Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 7 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

“perpustakaan berada disebelah kanan kantor BPS, yang mana gedung perpustakaan bergabung dengan gedung BPS”

Lokasi perpustakaan sudah sesuai dengan apa yang ada di standar bahwa perpustakaan harus didalam satu gedung dengan kantor.

c. Sarana Pelayanan Dan Sarana Kerja Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

Standar Nasional Perpustakaan Khusus:⁷⁸

1. Lahan

- a) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- b) Lahan perpustakaan harus berada dilokasi yang mudah di akses, aman, dan nyaman serta berdekatan dengan gedung instansi atau organisasi induknya.

2. Ruang

Perpustakaan paling sedikit memilki ruangan koleksi, ruangan baca, dan ruangan kerja.

3. Perabotan/peralatan

Perpustakaan paling sedikit memiliki : rak buku (4 buah), rak majalah (1 buah), meja baca (10 buah), meja kerja (2 buah), kursi baca (15 buah), perangkat komputer (2 unit).

Wawancara dengan staf layanan perpustakaan:⁷⁹

⁷⁷Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

⁷⁸Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 8 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

“lahan perpustakaan berdekatan dengan kantor BPS, ruangan yang ada pada perpustakaan BPS yaitu ruangan baca, dan ruangan staf inti dan kepala perpustakaan yang menjadi satu, perabotan yang ada di perpustakaan yaitu 2 lemari, 3 meja panjang dan 1 meja bulat untuk pemustaka, 4 meja kerja, 16 kursi pemustaka, 7 perangkat komputer.

Perpustakaan BPS memiliki lahan, gedung atau ruangan yang mudah diakses, aman, nyaman dan berdekatan dengan lembaga induk yang udah sesuai dengan standar. Ruangan yang ada di perpustakaan BPS sudah sesuai dengan standar yaitu meliputi ruangan koleksi, ruangan baca dan ruangan kerja. Perabotan atau peralatan di perpustakaan belum sesuai dengan standar bahwa di perpustakaan tidak terdapat rak majalah dan lemari hanya berjumlah 2 buah yang seharusnya tiga. Berdasarkan data tersebut dan standar bahwa sarana pelayanan-sarana kerja perpustakaan hampir memenuhi standar nasional perpustakaan karena hanya pada bagian perabotan perpustakaan yang belum memenuhi standar yaitu perpustakaan tidak memiliki rak majalah dan lemari hanya berjumlah 2 buah.

Berdasarkan data wawancara diatas didapat bahwa sarana dan prasarana di perpustakaan BPS ada beberapa poin yang belum memenuhi standar yaitu bagian gedung dan sarana pelayanan dan sarana kerja, yang mana pada poin tersebut ada beberapa aspek belum memenuhi standar. Pada poin gedung didapat bahwa gedung perpustakaan hanya berukuran 160m^2 yang seharusnya berukuran 200m^2 dan pada poin sarana pelayanan dan sarana kerja bahwa jumlah lemari hanya 2 buah yang seharusnya 3 dan tidak adanya rak majalah.

⁷⁹Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

3. Pelayanan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



a. Jam Buka Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus jam perpustakaan paling sedikit 37,5 jam per-minggu.⁸⁰

Wawancara kepada staf layanan BPS:

“perpustakaan dibuka pada hari senin-kamis buka jam 8 tutup pukul 15: 30, hari jumat pukul buka pukul 8 dan tutup pukul 16:00”⁸¹

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa jam buka layanan perpustakaan BPS setelah dihitung yaitu berjumlah 37,5 jam perminggu, sedangkan pada standar yaitu 37,5 perminggu jadi jam buka layanan perpustakaan sudah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

⁸⁰Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 8 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁸¹Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

b. Jenis Pelayanan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus jenis pelayanan paling sedikit pelayanan baca ditempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, dan bimbingan pemustaka.⁸²

Wawancara kepada staf layanan perpustakaan:⁸³

“layanan pustaka cetak atau buku yang tersedia diperpustakaan, layanan konsultasi gratis, layanan perpustakaan digital, layanan kunjungan website”

Layanan yang di perpustakaan BPS berdasarkan wawancara langsung dan observasi bahwa pelayanan di perpustakaan BPS belum memenuhi standar, bahwa didalam standar jenis pelayanan di perpustakaan paling sedikit yaitu layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi dan bimbingan pemustaka, sedangkan di perpustakaan BPS layanan referensi tidak ada berdasarkan wawancara sebelumnya pada koleksi perpustakaan di bagian jenis koleksi perpustakaan.

c. Kerja Sama Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan pelayanan pemustaka, perpustakaan

⁸²Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 8 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁸³Wawancara langsung kepada bapak Muhammad Agus Prayitno (staf layanan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang senin 23-09-2019 pukul 09:30 WIB

melakukan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan instansi atau diluar instansi bersangkutan.⁸⁴

Wawancara dengan kepala perpustakaan:⁸⁵

“kerjasama dengan instansi-instansi lain yaitu pada tanggal 19 februari perpustakaan melakukan MOU dengan Gubernur terkait dengan satu data seluruh indonesia, dengan satu data indonesia ini akan dibentuk forum data untuk kesepakatan data apa saja yang akan di yang kita publish diperpustakaan kita, MOU dengan Gubernur berarti perpustakaan sudah bekerjasama dengan seluruh instansi, misalkan data penduduk dinas bkkbn lain, catatan sipil lain, bps lain mana data yang harus digunakan”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa di perpustakaan sudah melakukan kerjasama dengan unit/lembaga lain untuk mengoptimalkan pelayanan data agar lebih lengkap, kerjasama perpustakaan pada poin pelayanan perpustakaan sudah memenuhi apa yang ada pada standar yang pada standar bahwa perpustakaan khusus untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan pelayanan dan melakukan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan instansi atau instansi luar.

d. Promosi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus promosi perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan untuk menginformasikan kepada pemustaka tentang koleksi yang dimiliki.⁸⁶

Wawancara dengan kepala perpustakaan:⁸⁷

⁸⁴Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 8 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁸⁵Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

⁸⁶Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 8 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

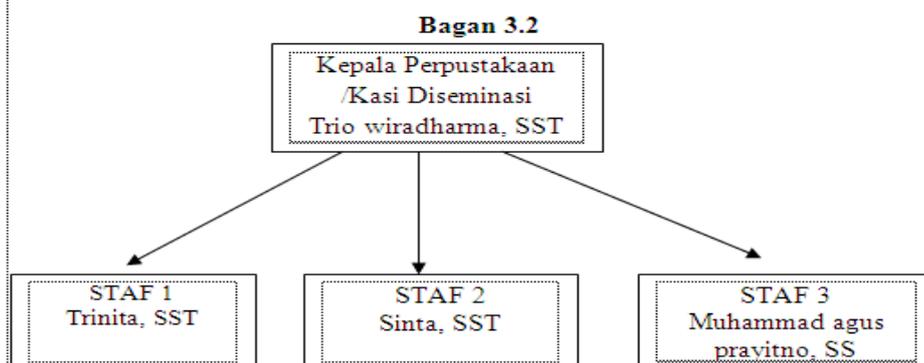
“promosi dilakukan melalui website kita dengan cara memberikan soft copy yang bisa didownload, setiap bulan ada 2 kali realis dan memberikan bahan tayangnya, terus berita resmi statistik kita berikan, kemudian info grafisnya juga kita berikan, kalau promosi yang turun kelapangan yaitu goes to kampus-kampus, MOU dengan Universitas Sriwijaya, dan membuat stand perpustakaan pada ivent atau acara-acara besar, brosur tentang data apa saja yang ada di perpustakaan.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sudah melakukan promosi secara berkesinambungan sesuai dengan apa yang ada di standar dan promosi yang dilakukan perpustakaan untuk memberitahukan koleksi yang ada di perpustakaan.

Dari data di atas bahwa layanan di perpustakaan BPS sudah sesuai dengan apa yang ada pada standar yang berarti pada pelayanan perpustakaan sudah memehuni Standar Nasional Perpustakaan Khusus no 14 tahun 2017.

4. Tenaga kerja perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Perpustakaan badan pusat statistik provinsi sumatera selatan memiliki 4 petugas yang memiliki tugas dan perannya masing-masing.⁴⁷



⁸⁷Wawancara pribadi kepada bapak Trio wiradharna (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

- a. Jumlah Tenaga Kerja Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus perpustakaan memiliki paling sedikit 3 orang, terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan, 1 orang pustakawan dan 1 orang tenaga teknis.⁸⁸

Wawancara dengan kepala perpustakaan:⁸⁹

“Jumlah tenaga kerja perpustakaan BPS terdiri dari 4 orang yaitu kepala perpustakaan, dua staf teknis dan satu staf layanan perpustakaan BPS, dan semua yang ada di perpustakaan adalah lulusan STIS, yang pada saat kuliah mengambil jurusan sosial kependudukan dan sosial ekonomi, di perpustakaan kami juga belum ada yang mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh perpustakaan nasional”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa jumlah tenaga kerja di perpustakaan Badan Pusat Statistik sudah melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Standar Nasional Perpustakaan akan tetapi pengelola di perpustakaan Badan Pusat Statistik tidak ada yang lulusan dari ilmu perpustakaan, sedangkan perpustakaan harus memiliki pustakawan.

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus bahwa pustakawan tersebut harus dari pendidikan diploma dua atau diploma tiga sarjana di bidang ilmu perpustakaan atau sarjana di bidang lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) atau Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT). Tenaga tersebut diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat

⁸⁸Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 8 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁸⁹Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan. Jadi data tersebut bahwa perpustakaan belum memiliki pustakawan, berarti perpustakaan dari tenaga kerja belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

b. Kualifikasi kepala Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus kepala perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan sarjana (S1) ilmu perpustakaan atau bidang ilmu lain ditambah diklat perpustakaan.⁹⁰

Wawancara dengan kepala perpustakaan:⁹¹

“saya jurusan statistik ekonomi, dan saya belum pernah mengikuti diklat”

Kepalaperpustakaan Badan Pusat Statistik Sumsel blm sesuai dengan standar yang ada pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus yang mana seharusnya walaupun bukan dari pendidikan perpustakaan tetapi sekurang-kurangnya kepala perpustakaan harus mengikuti diklat yang ada pada Perpustakaan Nasional.

c. Pustakawan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus pustakawan yang berpendidikan diploma dua atau diploma tiga, sarjana di bidang ilmu perpustakaan atau sarjana bidang lain yang telah mengikuti pendidikan dan

⁹⁰Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 8 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁹¹Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

pelatihan Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) atau Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT). Tenaga tersebut diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan.⁹²

Wawancara kepada kepala perpustakaan:

“di perpustakaan kami tidak ada yang dari jurusan ilmu perpustakaan pustakawan, karena tidak adanya penerimaan untuk tenaga dari perpustakaan yang dibuka oleh kantor BPS, pustakawan tidak ada tetapi tenaga fungsional pustakawan ada yaitu bapak Agus”⁹³

Berdasarkan wawancara diatas bahwa perpustakaan tidak memiliki pustakawan tetapi di perpustakaan terdapat fungsional pustakawan. Berdasarkan undang-undang No 43 Tahun 2007 pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepastakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan⁹⁴ sedangkan tenaga fungsional pustakawan berdasarkan KEMENPAN adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan

⁹²Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 8 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁹³Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharna (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

⁹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan (Jakarta: perpustakaan Nasional RI, 2007) hal 3.

pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pemerintah atau unit tertentu lainnya.⁹⁵

Berdasarkan data diatas bahwa pustakawan dan tenaga fungsional pustakawan itu berbeda, jadi di perpustakaan Badan Pusat Statistik tidak mempunyai tenaga pustakawan faktor yang menyebabkan hal tersebut karena memang tidak adanya penerimaan lulusan khusus untuk perpustakaan, yang berarti tenaga perpustakaan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Khusus karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada pada standar.

d. Tenaga Teknis Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus pegawai yang berpendidikan paling rendah diploma non ilmu perpustakaan dan informasi yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga tersebut diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penunjang kegiatan perpustakaan.⁹⁶

Wawancara kepada kepala perpustakaan:⁹⁷

“ada 2 tenaga teknis di perpustakaan BPS. Yang diberi wewenang dari kepala perpustakaan untuk melakukan tugas di perpustakaan seperti

⁹⁵Kemntrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2002 tentang tenaga fungsional pustakawan (Jakarta: kepmenpan,2002) hal 12.

⁹⁶Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 9 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁹⁷Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

promosi, menghendel dokumen yang ada pada komputer seperti dokumen tentang berapa pemustaka yang datang ke perpustakaan setiap bulannya.”

Tenaga teknis yang ada di perpustakaan ada 2 orang yaitu ibu Trinita, SST dan ibu Sinta, SST yang mana dapat dilihat dari gelarnya bahwa mereka bukan dari jurusan ilmu perpustakaan, tetapi berdasarkan standar bahwa tenaga teknis minimal berpendidikan paling rendah diploma non perpustakaan. ibu nita dan ibu sinta bertugas mengolah data yang ada di komputer, dan menjadi penunjang kegiatan perpustakaan. berarti pada poin tenaga teknis perpustakaan sudah sesuai dengan apa yang ada pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

- e. Pembinaan TenagaPengelola Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti seminar/workshop kepastakawanan dan menjadi anggota organisasi profesi kepastakawanan.⁹⁸

Wawancara dengan kepala perpustakaan:⁹⁹

“pegawai perpustakaan kita dipanggil oleh BPS Pusat yang ada di jakarta untuk melakukan pelatihan pelayan prima, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan publikasi”¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pegawai perpustakaan Badan Pusat sudah mengikuti pelatihan untuk pelayanan prima, pengelolaan

⁹⁸Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 9 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

⁹⁹Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

¹⁰⁰Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

perpustakaan dan pengelolaan publikasi yang diberikan oleh lembaga BPS Pusat yang berdasarkan standar nasional perpustakaan bahwa pembinaan dan tenaga perpustakaan sudah memenuhi standar karena pelatihan tersebut sama halnya dengan mengikuti seminar atau workshop kepastakawanan yang berdasarkan standar.

Berdasarkan data diatas tentang tenaga pengelola perpustakaan hanya 2 poin yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Khusus No 14 Tahun 2017 yaitu pada bagian tenaga teknis dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan.

5. Penyelenggaraan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

a. Visi Dan Misi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus Visi perpustakaan menggambarkan pada tugas pokok dan fungsi perpustakaan yang mengacu pada organisasi induk dan Misi perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi semua pemustaka di lembaga induk, serta masyarakat sekitar.¹⁰¹

Visi misi di perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan:

1. Visi

“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”

2. Misi

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

¹⁰¹Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 9 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

- b. Memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan¹⁰²

Visi dan misi perpustakaan sudah sesuai dengan standar yang mana terdapat pada standar bahwa visi di perpustakaan menggambarkan pada tugas pokok dan fungsi perpustakaan yang mengacu pada organisasi induk, perpustakaan khusus berada dibawah lembaga badan pusat statistik yang berdasarkan organisasi induk yang bergerak pada statistik bahwa visinya adalah sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua berarti sudah sesuai dengan lembaga induk. Misinya berdasarkan standar yaitu perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi semua pemustaka di lembaga induk dan masyarakat sekitar. Dapat dilihat bahwa misi pada poin pertama bahwa perpustakaan menyediakan data statistik berkualitas yang mana bahan perpustakaan BPS yaitu berupa data statistik dan pada poin kedua terdapat sistem yang berhubungan dengan akses informasi bagi pemustaka.

- b. Pembentukan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut standar nasional perpustakaan khusus pembentukan perpustakaan yaitu:

¹⁰²Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, visi dan misi perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (document). Palembang 2 agustus 2019

1. Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab lembaga induk, dan dipimpin oleh seorang kepala.
2. Perpustakaan dibentuk dengan surat keputusan pimpinan lembaga induk dan memiliki status kelembagaan yang jelas serta memberitahukan kepada Perpustakaan Nasional.
3. Pembentukan perpustakaan harus memenuhi syarat, memiliki koleksi, tenaga, sarana-prasarana (termasuk gedung perpustakaan), dan sumber pendanaan.¹⁰³

Wawancara kepada kepala perpustakaan:

*“penyelenggaraan perpustakaan ditanggung jawab oleh lembaga induk BPS RI, dan memberitahukan kepada perpustakaan Nasional karena perpustakaan juga setiap tahunnya rutin memberikan publikasi dari BPS untuk Perpustakaan Nasional ”*¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pembentukan perpustakaan sudah memenuhi standar, yang didalam standar yaitu 1. Perpustakaan menjadi tanggung jawab lembaga induk, dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan, 2. Perpustakaan dibentuk oleh keputusan pimpinan lembaga induk dan memiliki status kelembagaan yang jelas dan diberitahukan kepada Perpustakaan Nasional, 3. Perpustakaan harus memenuhi syarat, memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana dan dana pada poin ketiga peneliti dapat di bagian sarana dan prasarana.

c. Tujuan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

¹⁰³Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 9 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

¹⁰⁴Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus tujuan perpustakaan yaitu:¹⁰⁵

1. Menunjang program lembaga induk.
2. Menunjang penelitian lembaga induk.
3. Menggalakkan minat baca dilingkungan unit kerja lembaga induk.
4. Memenuhi kebutuhan lembaga induk.

“untuk memenuhi aspek pelayanan masyarakat dari perpustakaan masyarakat bisa tahu produk-produk apa saja yang dihasilkan melalui sensus kita, kemudian dari perpustakaan ini juga masyarakat dapat kita edukasi tentang pentingnya data yang kadang-kadang masyarakat belum paham akan pentingnya data, dari adanya perpustakaan ini masyarakat bisa tahu akan pentingnya data dan membantu lembaga induk dalam menyebarkan data”¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa tujuan perpustakaan sudah memenuhi standar, yang didalam standar yaitu poin 1. Menunjang program lembaga induk dan poin 2 menunjang penelitian lembaga induk yang sama halnya dengan wawancara poin pertama adalah untuk memenuhi aspek pelayanan masyarakat supaya mereka tahu produk-produk apa saja yang dihasilkan melalui sensus kita, yang mana program lembaga induk yaitu agar masyarakat tentang data-data penduduk. Pada poin 3. Menggalakkan minat baca dilingkungan unit kerja lembaga induk yang sama halnya dengan memberikan edukasi tentang pentingnya data kepada pemustaka, pada poin 4. Memenuhi kebutuhan lembaga induk, sama halnya dengan poin

¹⁰⁵Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 9 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

¹⁰⁶Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

wawancara perpustakaan membantu kegiatan lembaga induk agar lebih ringan.

d. Kebijakan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus kebijakan perpustakaan khusus terintegrasi atau sinergis dengan kebijakan lembaga induk.¹⁰⁷

“kebijakan untuk penyelenggaraan perpustakaan itu berdasarkan kebijakan dari lembaga induk karena yang memiliki kewenangan pelaksanaan di perpustakaan itu lembaga induknya, dan apapun kegiatan yang akan dilakukan oleh perpustakaan harus ada izin terlebih dahulu kepada kepala BPS”¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa Kebijakan perpustakaan sama dengan kebijakan kantornya, karena semua kegiatan yang ada di perpustakaan harus meminta izin terlebih dahulu kepada kepala BPS kecuali untuk pengelolaan perpustakaan melakukan secara mandiri dengan prosedur yang baku. Berdasarkan data tersebut bahwa Kebijakan perpustakaan sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

e. Tugas Dan Fungsi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus tugas dan fungsi perpustakaan yaitu:¹⁰⁹

1. Tugas perpustakaan

¹⁰⁷Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 9 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

¹⁰⁸Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

¹⁰⁹Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 10 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

Melayani pemustaka dengan menyediakan bahan perpustakaan atau bacaan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga induk dan masyarakat sekitar.

2. Fungsi perpustakaan

Sebagai perpustakaan rujukan, pusat deposit dan pusat sumber belajar masyarakat dilingkungan lembaga induk.

Wawancara kepada kepala perpustakaan :¹¹⁰

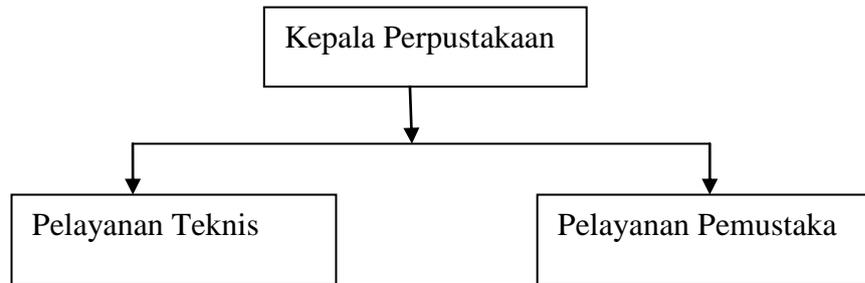
“Tugas perpustakaan kita melayanipemenuhan akan pentingnya data, mensosialisasikan produk-produk yang dihasilkan dari survei dan sensus kita, melayani konsultasi statistik, fungsi perpustakaan menyediakan data statistik yang berkualitas, memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan”

Berdasarkan wawancara tersebut tugas perpustakaan belum memenuhi standar nasional perpustakaan karena koleksi yang pada perpustakaan BPS hanya koleksi yang berasal dari lembaga induknya, tidak adanya koleksi lain untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Sedangkan fungsi perpustakaan berdasarkan standar juga belum memenuhi standar karena koleksi yang ada diperpustakaan hanya koleksi yang berasal dari lembaga induknya, selain itu tidak ada. Pada fungsi perpustakaan sudah memenuhi standar dapat lihat dari wawancara diatas bahwa perpustakaan menjadi pusat sumber rujukan dibuktikan dari wawancara

f. Organisasi PerpustakaanBadan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

¹¹⁰Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus struktur organisasi perpustakaan terdiri dari :



Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus diatas bahwa struktur organisasi perpustakaan sama dengan yang ada pada standar, struktur organisasi di perpustakaan berbentuk sentralisasi, sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Bahwa di perpustakaan yang memiliki wewenang terhadap perpustakaan adalah kantor BPS itu sendiri karena anggaran yang diberikan oleh negara diatur oleh kantor baru diberikan kepada perpustakaan, tetapi anggaran yang di berikan kantor untuk perkembangan perpustakaan hanya sedikit yaitu sekitar 15 juta setiap 2 tahun sekali tetapi tidak rutin jika anggaran tersebut ada baru diberikan sisanya anggaran tersebut diberikan untuk kegiatan kantor.

g. Status Kelembagaan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus status kelembagaan perpustakaan khusus dilembaga pemerintahan paling rendah setara dengan eselon IV, sedangkan perpustakaan khusus di lembaga swasta di bawah

wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan lembaga induk.¹¹¹

“status kelembagaan di perpustakaan tergabung dengan kantor dan setara dengan eselon IV”¹¹²

Berdasarkan wawancara diatas bahwa status kelembagaan perpustakaan sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus, yang di dalam bahwa status kelembagaan harus di bawah wewenang pimpinan lembaga induk dan status kelembagaanya juga setara dengan eselon IV.

h. Program Kerja Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus program kerja di perpustakaan yaitu:¹¹³

1. Perpustakaan menyusun, menetapkan dan memiliki program strategis yang mengacu pada kebijakan lembaga induk.
2. Program kerja strategis dan program kerja tahunan menjadi acuan kerja manajemen dan staf perpustakaan.

Wawancara kepada kepala perpustakaan:¹¹⁴

¹¹¹Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 10 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

¹¹²Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

¹¹³Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 10 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

¹¹⁴Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

“program kami diperpustakaan yang pertama ARC adalah janji kepada konsumen terkait publikasi apa saja yang akan ditampilkan di website apabila program ARC tidak terlaksana maka hal tersebut akan menjadi hal yang buruk bagi perpustakaan, kedua layanan live chat yaitu layanan konsumen bisa bertanya langsung dengan perpustakaan BPS RI, ketiga melakukan kunjungan goes to kampus yang setiap tahun di lakukan. Program kerja ini berdasarkan kebijakan dari lembaga induk”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat penyelenggaraan program kerja perpustakaan sudah sesuai dengan program yang mengacu pada lembaga induk, dan perpustakaan memiliki program kerja tahunan yaitu goes to kampus yang dilaksanakan untuk memberitahukan data-data apa yang ada di perpustakaan Badan Pusat Statistik, selain goes to kampus perpustakaan berdasarkan wawancara di atas juga memiliki program kerja yaitu arc penerbitan 12 publikasi setiap tahunnya, yang mana jika perpustakaan tersebut tidak menerbitkannya maka itu akan menjadi sebuah kinerja yang buruk bagi perpustakaan.

i. Pengembangan perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus pengembangan perpustakaan yaitu:¹¹⁵

1. Kebijakan dalam pengembangan perpustakaan menjadi kewenangan pimpinan lembaga induk.
2. Pengaturan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan menjadi kewenangan pimpinan lembaga induk.
3. Perpustakaan khusus menyelenggarakan kerjasama antar perpustakaan.

¹¹⁵Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 10 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -07-2019

Wawancara kepada kepala perpustakaan:¹¹⁶

“kebijakan pengembangan perpustakaan menjadi kewenangan dari kepala lembaga induk, tetapi ide bisa dari mana aja dalam pengembangan perpustakaan dari bawah keatas ataupun sebaliknya, yang mengatur, mengevaluasi dan mengawasi penyelenggaraan pengembangan perpustakaan yaitu pimpinan BPS, dan BPS RI. perpustakaan tidak melakukan kerjasama dengan perpustakaan secara resmi, tetapi perpustakaan BPS berkewajiban memberikan koleksi tentang data-data penduduk ke perpustakaan daerah”¹¹⁷

Dari wawancara diatas didapat bahwa pengembangan perpustakaan sudah memenuhi standar pada poin pertama bahwa kebijakan dalam pengembangan koleksi menjadi kewenangan lembaga induk karena perpustakaan secara tidak langsung sudah melakukan kerjasama dengan perpustakaan daerah, karena dengan data-data yang diperpustakaan daerah pemustaka tahu tentang kependudukan dan jika pemustaka tidak puas dengan data yang di perpustakaan pemustaka pasti akan bertanya dimana tempat untuk medapatkan data yang lebih lengkap.

Berdasarkan data diatas bahwa penyelenggaraan perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan hampir memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Khusus karena hanya 1 poin saja dari standar yang belum terpenuhi yaitu pada bagian tugas dan fungsi perpustakaan bahwa koleksi di perpustakaan belum memenuhi kubutuhan masyarakat sekitar.

¹¹⁶Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

¹¹⁷Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

6. Pengelolaan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Proses pengolahan dalam perpustakaan khusus prinsipnya tidak jauh berbeda dengan perpustakaan pada umumnya hanya biasanya dalam proses pengolahan dituntut untuk lebih memperhatikan kecepatan dalam temu kembali dan penyajian. Sehingga terkadang dalam klasifikasi contohnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter perpustakaan tersebut¹¹⁸

a. Perencanaan perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus perencanaan perpustakaan yaitu:

1. Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
2. Perpustakaan menyusun rencana kerja dan program kerja.
3. Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana kerja dan program kerja

Wawancara kepada kepala perpustakaan:¹¹⁹

“perencanaan diperpustakaan itu belum dilakukan secara berkesinambungan,karena tidak dilakukan secara terus-menerus kalau berdasarkan fungsi dan tujuan sudah sesuai”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa perencanaan perpustakaan belum memenuhi standar pada poin 1 yaitu sesuai apa yang ada pada standar bahwa poin pertama berisikan 1. Perencanaan perpustakaan

¹¹⁸Arif surachman, pengelolaan perpustakaan khusus, (jogjakarta: universitas Gajah Mada,2005) di akses melalui https://www.researchgate.net/publication/28805778_pengelolaan_perpustakaan_khusus_special_library_managemet. hal 3 diakses pada 14/10/2019

¹¹⁹Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.

b. Anggaran Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus anggaran di perpustakaan secara rutin bersumber dari anggaran induk dan dapat bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.¹²⁰

“anggaran untuk perpustakaan di turun oleh kantor BPS yang didapat atau berikan oleh negara, anggaran yang diberikan yaitu 50 juta tetapi untuk pengembangan perpustakaan hanya 15 juta per-dua tahun”¹²¹

Anggaran perpustakaan berdasarkan wawancara diatas diberikan oleh kantor Badan Pusat Statistik yang didapat melalui negara, anggaran perpustakaan sudah sesuai dengan apa yang terdapat pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

c. Pelaksanaan perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus pelaksanaan perpustakaan:¹²²

1. Pelaksanaan perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel serta memiliki prosedur yang baku.
2. Indikator keberhasilan perpustakaan ditentukan oleh tingkat kepuasan pemustaka.

¹²⁰Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 11 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -07-2019

¹²¹Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan BPS Sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

¹²²Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 11 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -07-2019

Wawancara kepada kepala perpustakaan:

“pelaksanaandi perpustakaan dilakukan secara mandiri, afektif serta memiliki prosedur yang baku”.¹²³

Wawancara kepada pemustaka:

*“saya puas dengan apa yang ada di perpustakaan, karena koleksi yang ada di BPS sudah bagus, penelusuran informasinya juga cepat karena terdapat OPAC di perpustakaan, sedangkan jika masih bingung pemustaka bisa bertanya ke Bapak Agus salah satu pegawai disana hanya saja penataan tempat di perpustakaan masih kurang baik”*¹²⁴

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pelaksanaan perpustakaan sudah hampir memenuhi standar karena pada poin 1 perpustakaan pengelolaan perpustakaan secara mandiri dengan sistem yang baku tetapi belum secara efisien karena pengelolaan memang butuh waktu, pada poin 2 perpustakaan sudah memenuhi kepuasan pemustaka sesuai dengan wawancara yang diatas bahwa pemustaka yang datang sudah merasa puas dengan apa yang terdapat di perpustakaan.

d. Pengawasan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus pengawasan perpustakaan:¹²⁵

1. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.

¹²³Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan BPS Sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

¹²⁴Wawancara langsung kepada marina (pemustaka di BPS Sumsel), Palembang 12-10-2019 pukul 10:00 WIB

¹²⁵Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 11 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -07-2019

2. Supervisi dilakukan oleh kepala perpustakaan dan pimpinan organisasi induknya secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas perpustakaan.
3. Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara atau masyarakat.
4. Pengawasan dilakukan oleh pemustaka di lingkungan lembaga induk berupa saran perbaikan.
5. Perpustakaan menyediakan fasilitas penyampaian saran dan pengaduan dari pemustaka.
6. Kepala perpustakaan menyelesaikan setiap saran atau pengaduan sesuai kewenangannya.¹²⁶

“perpustakaan diawasi oleh BPS Sumsel dan BPS RI untuk melakukan evaluasi, mana pengawasan ini dilakukan secara peringkatan, alhamdulillah perpustakaan mendapatkan peringkat ke 4, BPS RI juga memberikan pembinaan untuk staf seperti layanan prima dan pengelolaan perpustakaan, di perpustakaan juga melayani penyampain saran dan pengaduan berupa kotak saran”¹²⁷

Pengawasan perpustakaan sudah memenuhi standar, bahwa pada pengawasan perpustakaan meliputi supervisi sudah di lakukan oleh lembaga induk dengan cara memberikan pelatihan langsung tentang perpustakaan seperti layanan prima, pengelolaan perpustakaan. Berdasarkan wawancara tersebut bahwa perpustakaan di awasi oleh BPS Sumsel dan BPS RI bukan hanya itu mereka juga melakukan evaluasi dengan cara memberikan peringkat, agar perpustakaan mengetahui sudah sejauh mana peningkatan di

¹²⁷Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

perpustakaan meningkat atukah menurun. Perpustakaan juga melakukan pelaporan kepada BPS Sumsel dan BPS RI yang rutin diberikan setiap bulan dan setiap tahun. selain itu perpustakaan juga menyediakan kotak saran dan krikitik untuk pemustaka sebagai bahan evaluasi untuk perpustakaan agar mengetahui apa saja yang kurang dari perpustakaan.

e. Pelaporan kinerja Perpustakaan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus pelaporan kinerja dilakukan oleh kepala perpustakaan dan disampaikan kepada pimpinan organisasi induknya.¹²⁸

*“pelaporan kinerja disampaikan ke kepala BPS, yang rutin setiap bulannya adalah agenda kegiatan perpustakaan BPS. Untuk laporan tahunan ada juga yaitu laporan dari kegiatan selama 1 tahun, kumpulan kegiatan selama 1 tahun, dan setiap kegiatan yang dilakukan perpustakaan membuat laporan.”*¹²⁹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaporan kinerja perpustakaan Badan Pusat Statistik sudah memenuhi standar yang mana didalam standar perpustakaan khusus yaitu pelaporan kinerja dilakukan oleh kepala perpustakaan dan disampaikan kepada pimpinan organisasi induk.

Berdasarkan data diatas bahwa pengelolaan perpustakaan Badan Pusat Statistik hampir memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Khusus, karena pada pertama tentang perencanaan perpustakaan belum dilakukan dengan berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan apa yang ada pada Standar Nasional Perpustakaan.

¹²⁸Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 “ Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus”,2017, hal 11 diakses <https://www.perpusnas.go.id/> pada 12 -10-2019

¹²⁹Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan BPS Sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

B. Kondisi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Observasi

- a. Tanda chek-list (√) yang ada pada kolom dan sesuaikan dengan jawaban tersebut.
- b. Pilihan “sesuai” bahwa penerapan Standar Nasional Perpustakaan Khusus yang sudah diterapkan oleh perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Pilihan “tidak sesuai ” untuk pernyataan penerapan Standar Nasional Perpustakaan Khusus yang belum diterapkan oleh perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

No	Daftar Standar Nasional Perpustakaan Khusus	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
1	Standar Koleksi Perpustakaan			Pada standar koleksi perpustakaan, perpustakaan belum memenuhi standar nasional perpustakaan khusus no 14 tahun 2017
	Jenis Koleksi			
	a. Karya cetak terdiri dari			
	1. buku	√		
	2. terbitan berkala		√	
	b. Karya rekam terdiri dari			
	1. rekaman suara		√	
	2. audio visual		√	
	c. Karya dalam bentuk elektronik	√		
	Perpustakaan menyediakan koleksi terbitan lokal	√		
	koleksi muatan lokal (<i>repository</i>)	√		

	Ruang lingkup koleksi perpustakaan terdiri dari bacaan umum,		✓	
	berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan lembaga induk dan masyarakat sekitarnya, seperti koleksi referensi,	✓		
	laporan penelitian,	✓		
	jurnal sesuai dengan organisasi induknya	✓		
	literatur kelabu.	✓		
	Koleksi referensi	✓		
	Jenis koleksi perpustakaan harus memenuhi kebutuhan pemustaka.		✓	
	Jumlah Koleksi :			
	1. Jumlah koleksi Paling sedikit 1000	✓		
	2. Persentase koleksi yang sesuai dengan subjek disiplin ilmu atau kepentingan instansi organisasi induk		✓	
	Pengembangan koleksi			
	1. Pengembangan koleksi	✓		

		berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi.			
		2. Penambahan koleksi paling sedikit 2% dari judul yang ada pertahun.	✓		
		3. Kebijakan pengembangan koleksi paling sedikit ditinjau setiap 4 tahun.		✓	
		4. Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi oleh kepala perpustakaan.		✓	
		5. Kebijakan pengembangan koleksi mencakup 1. Seleksi 2. Pengadaan 3. penyiangan bahan perpustakaan.	✓	✓	✓
		Cacah ulang/ stoke opname dan Penyiangan 1. Perpustakaan melakukan cacah ulang dan penyiangan koleksi paling		✓	

		sedikit setiap 3 tahun sekali.		
		2. Penyiangan dilakukan dengan mempertimbangan koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain. Disamping itu mempertimbangan jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi.		✓
		Pengolahan bahan perpustakaan		
		1. Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sistem baku terhadap bahan perpustakaan.	✓	
		2. Bahan perpustakaan yang telah diolah selanjutnya dikirim dan diujarkan dalam		✓

		ruang koleksi paling lama 3 hari dalam proses pengolahan			
		3. Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.	✓		
		Pelestarian koleksi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan pengulangan kerusakan fisik atau pengalihmediaan isi dari suatu format ke format lain.	✓		
2	Sarana dan Prasarana	Gedung perpustakaan : 1. Luas bangunan paling sedikit 200 m ²		✓	Pada standar sarana prasarana , perpustakaan belum memenuhi standar nasional perpustakaan khusus no 14 tahun 2017
		2. Memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pemustaka.	✓		
		3. Lantai bangunan yang digunakan untuk menempatkan koleksi harus memenuhi persyaratan	✓		

		konstruksi paling sedikit 400 kg per m ² atau ekuivalen.			
		4. Perpustakaan harus memiliki fasilitas umum.	✓		
		Lokasi Perpustakaan Terletak dalam satu gedung dengan lembaga induk atau tempat yang berdekatan dengan gedung lembaga induk	✓		
		Sarana Pelayanan Dan Sarana Kerja 1. Lahan	✓		
		2. Ruang Perpustakaan	✓		
		3. Perabot atau peralatan Perpustakaan		✓	
3.	Standar Pelayanan	a. Jam Buka perpustakaan b. Jenis layanan c. Kerjasama	✓ ✓ ✓ ✓		Pada standar pelayanan perpustakaan sudah memenuhi standar nasional perpustakaan khusus tahun 2017.

		d. Promosi			
4.	Standar Tenaga Perpustakaan	a. Jumlah tenaga perpustakaan b. Kualifikasi Kepala Perpustakaan c. Pustakawan d. Tenaga teknis perpustakaan e. Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	Pada standar tenaga perpustakaan, perpustakaan belum memenuhi standar nasional perpustakaan.

5.	Standar Penyelenggara aan Perpustakaan	a. Visi perpustakaan b. Misi perpustakaan c. Pembentukan Perpustakaan d. Tujuan perpustakaan e. Kebijakan f. Fungsi dan Tugas Perpustakaan g. Struktur Organisasi Perpustakaan h. Status Kelembagaan i. Program Kerja j. Pengembangan Perpustakaan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Pada standar penyelenggaraan perpustakaan, perpustakaan belum memenuhi standar nasional perpustakaan
----	---	--	---	---	--

6.	Standar Pengelolaan Perpustakaan	a. Perencanaan Perpustakaan b. Anggaran c. Pelaksanaan Perpustakaan d. Pengawasan e. Pelaporan Kinerja	 ✓ ✓ ✓ ✓	✓	Pada standar pengelolaan, perpustakaan belum memenuhi standar
----	---	--	--------------------------	---	---

Berdasarkan pada tabel observasi diatas dapat dilihat bahwa keadaan perpustakaan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, sudah hampir memenuhi keseluruhan apa yang terdapat pada standar, dan bagian standar yang sudah terpenuhi secara lengkap yaitu standar layanan di perpustakaan. sedangkan yang standar yang lain ada beberapa poin yang belum terpenuhi.

Padapoin pertama tentang standar koleksi bahwa koleksi di perpustakaan tidak memiliki terbitan berkala, rekaman suara, audio visual, koleksi umum dan jenis koleksi di perpustakaan juga belum memenuhi kepuasan pemustaka, persentase koleksi yang sesuai dengan lembaga induk hanya 50% yang seharusnya 60%, kebijakan secara tertulis tentang kebijakan pengembangan koleksi tidak ada, kebijakan pengembangan koleksi hanya ada pengadaan sedangkan seleksi dan penyiangan belum ada dan secara tertulis juga tak ada, kebijakan pengadaan juga tergantung dari kegiatan ARC, perpustakaan tidak melakukan cacah ulang yang seharusnya dilakukan paling sedikit 3 tahun sekali,

bahan koleksi yang dalam proses pengolahan belum diujarkannya sampai di acc oleh kepala perpustakaan.

Pada poin kedua tentang sarana-prasarana yang belum memenuhi standar yaitu luas ruangan hanya 160m² yang seharusnya 200m², perabotan atau peralatan di perpustakaan yang belum memadai yaitu tidak memiliki rak majalah dan lemari hanya berjumlah 2 saja.

Poin keempat standar tenaga perpustakaan yang belum memenuhi standar yang pertama jumlah tenaga kerja, kualifikasi kepala perpustakaan belum memenuhi standar karena bukan dari jurusan ilmu perpustakaan melainkan dari jurusan statistik dan tidak mengikuti diklat, serta tidak adanya pustakawan di perpustakaan.

Poin kelima, tentang standar penyelenggaraan perpustakaan bahwa perpustakaan belum memenuhi standar karena pada poin tugas perpustakaan belum memenuhi kebutuhan pemustaka tidak terdapat struktur organisasi yang terdapat di dalam perpustakaan dan program kerja tidak ada secara tertulis.

Poin keenam, tentang standar pengelolaan perpustakaan yang belum memenuhi standar yaitu yang pertama pada perencanaan di perpustakaan belum memenuhi standar.

Berdasarkan data diatas bahwa perpustakaan belum memenuhi standar karena perpustakaan belum menerapkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus No 14 Tahun 2017 secara keseluruhan terdapat beberapa poin standar yang belum ada atau belum sesuai.

C. Kendala yang dihadapi Perpustakaan dalam Penerapan Standar

Dalam upaya menerapkan standar di perpustakaan, pasti terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, peneliti melakukan wawancara kepada kepala perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut:¹³⁰

“kendala yang dihadapi terutama terkait keterbatasan sumber daya termasuk SDM dan anggaran”

Berdasarkan wawancara tersebut didapat bahwa kendala yang dihadapi perpustakaan Badan Pusat statistik provinsi sumatera selatan berupa kurangnya Sumber Daya Manusia dan anggaran.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia/staf perpustakaan adalah kemampuan terpadu yang terdiri dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara etis dan sosial yang bertanggung jawab.¹³¹

Berkaitan dengan sumber daya manusia/staf perpustakaan, Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1 kepala perpustakaan dan 3 staf perpustakaan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut: Kepala perpustakaan berlatar belakang pendidikan statistik ekonomi, dua staf teknis

¹³⁰Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharma (kepala perpustakaan perpustakaan bps sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB

¹³¹Aidilla Qurotianti, *“Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menerapkan Pelayanan Prima di Perpustakaan Perguruan Tinggi : Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”* Ikatan Pustakawan Indonesia, Vol 3 No. 1 (2008), hlm. 3.

berlatar belakang pendidikan statistik ekonomi, dan satu staf layanan berlatar belakang pendidikan sosial kependudukan.

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa perpustakaanBadan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki pegawai/staff yangberlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Dengan demikian, yang menjadi kendala dalam upaya penerapan standar Nasional Perpustakaan Khususdi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yaitu, tidak adanya staf perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Sebagaimana diungkapkan staf layanan perustakaan.

“kami semuanya yang ada diperpustakaan ini adalah lulusan STIS, yang waktu kuliahnya ada yang mengambil jurusan sosial kependudukan dan sosial ekonomi”

2. Anggaran

Anggaran adalah unsur utama untuk menjalankan perpustakaan, tanpa anggaran perpustakaan tidak mungkin dapat berjalan dengan sempurna meskipun sistemnya bagus dan pustakawannya bermutu.¹³²

Anggaran di perpustakaan Badan Pusat Statitik Provinsi Sumatera Selatan berasal dari lembaga induknya yang diberikan oleh negara yang mana anggaran tersebut bersifat global, berjumlah 50 juta yang diperuntukkan untuk kegiatan BPS termasuk perpustakaan, kegiatan BPS yaitu survei, kegiatan untuk sosialisasi dan kegiatan (*Focus Group Discussion*) FGD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala perpustakaan sebagai berikut:

¹³²Murniaty, manajemen dan organisasi perpustakaan sekolah, (Medan :perpustakaan sekolah di kabupaten serdang, 2006) hal 12

“anggaran diberikan setahun sekali, anggaran tersebut bersifat global ada untuk kegiatan rutin seperti survei, ada kegiatan untuk sosialisasi dan kegiatan FGD dan perpustakaan tetapi hanya sedikit sekitar 15 juta setiap 2 tahun, tetapi tidak rutin per dua tahun sekali ”¹³³

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggaran untuk pengembangan perpustakaan hanya sedikit, karena pengadaan koleksi yang ada di perpustakaan Badan Pusat Statistik berasal dari kantor Badan Pusat Statistik, dan perpustakaan hanya bertugas untuk mengelola bahan pustaka dan yang berwenang atau yang memiliki hak dalam pengembangan perpustakaan adalah kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

¹³³Wawancara langsung kepada bapak Trio wiradharna (kepala perpustakaan BPS Sumsel), Palembang 03-10-2019 pukul 08:08 WIB